

Analisis Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kota Administrasi Jakarta Timur

Fikri, Nuraini

Deskripsi Lengkap: <https://lib.fkm.ui.ac.id/detail.jsp?id=135748&lokasi=lokal>

Abstrak

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kota Jakarta Timur dilandasi oleh Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi penularan, menurunkan angka kesakitan dan kematian karena COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat sehingga mampu tetap produktif secara sosial maupun ekonomi. Untuk mencapai kekebalan kelompok diperlukan capaian vaksinasi minimal 70% dan pemerintah menargetkan pada akhir tahun 2020 semua daerah mencapai target tersebut. Namun hingga Februari 2022, kota Jakarta Timur masih memiliki capaian sebesar 66.53% untuk dosis 1 dan 59.93% untuk dosis lengkap. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kota Administrasi Jakarta Timur. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan dan telaah dokumen menggunakan framework teori Edward III dan teori Van Meter dan Van Horn. Informan penelitian yaitu PJ Vaksinasi COVID-19 di tingkat puskesmas kecamatan. Penelitian ini dilakukan pada bulan April hingga awal Juni 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sudah berjalan, namun terdapat ketidaksinkronan antara pcare dengan pedulilindungi dan/atau dukcapil, komunikasi kepada pelaksana kebijakan telah dilakukan dengan baik, sumberdaya manusia mulai terbatas, fasilitas memadai, namun akhir-akhir ini vaksin mendekati expired date, koordinasi antar bagian yang terlibat dan antar instansi cukup terjalin dengan baik, SOP yang ada masih menggunakan juknis yang lama atau belum terbaharui, disposisi pelaksana kebijakan baik, serta lingkungan sosial dan politik cukup berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Faktor yang menjadi hambatan ialah minat masyarakat mulai menurun, khususnya untuk dosis lanjutan karena tidak adanya regulasi ketat terkait vaksinasi dosis lanjutan (booster). Dengan demikian pelaksanaan vaksinasi COVID-19 masih perlu ditingkatkan dengan melaksanakan koordinasi dengan BPJS terkait pcare dan pedulilindungi, koordinasi dengan Badan POM dan PT. Bio Farma terkait vaksin COVID-19, dan monitoring evaluasi terkait vaksin dan rantai dingin di puskesmas kecamatan. Selain itu diperlukan adanya regulasi terkait pelaksanaan vaksinasi lanjutan.

The implementation of the COVID-19 vaccination in East Jakarta City based on Presidential Regulation Number 99 of 2021 concerning the Procurement of Vaccines and Implementation of COVID-19 Vaccinations, then Minister of Health Regulation Number 10 of 2021 concerning the Implementation of COVID-19 Vaccinations. The policy aims to reduce transmission, minimize morbidity and mortality due to COVID19 and build a group immunity in the community to remain socially and economically productive. The governments targeted that by the end of 2021, all the regions could achieve at least 70% of the target population. However, until February 2022, the city of East Jakarta's achievements are still under the target, for the 1st dose was 66.53% and 59.93% for the completed dosage. The purpose of this study is to analyze the implementation of the COVID-19 vaccination policy implementation in the Administrative City of East

Jakarta. This qualitative research collects the data through in-depth interviews with informants and document review using the Edward 3's framework and van meter and van horn theory. The informants are PIC of vaccination program in primary health care. The study was conducted from April to June 2022 with results showing the policy implementation has been running, however, there is unsynchronized between the Pcare and pedulilindungi and/or the dukcapil, communication to policy implementation has been carried out well, human resources are starting to be limited, facilities are adequate, but lately, the vaccine is approaching the expiration date, coordination between the parts involved and between agencies is quite well established, the existing SOPs are still using the old technical guidelines or not yet updated, the disposition of policy implementers is good, and the social and political environment is quite influential on policy implementation. The constraining factor is that public interest has begun to decline, especially for follow-up doses due to the absence of strict regulations regarding booster doses of vaccination. Thus, the implementation of the COVID-19 vaccination still needs to be improved by coordinating with BPJS related to care and protection, coordination with the Food and Drug Administration (BPOM), and PT.Bio Farma is associated with the vaccine of COVID-19, and monitoring evaluations associated with vaccines and the cold chain at sub-district health centers. In addition, there is a need for regulations related to the implementation of further vaccination.